

## MODEL KEWIRAUSAHAAN PADA PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN (TKI) DI LOMBOK BARAT-NTB

NENET NATASUDIAN JAYA dan I GUSTI MADE SUBRATA

Fakultas Ekonomi Univ. Mahasaraswati Mataram

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mental kewirausahaan para buruh migran dan pola pemberdayaan kewirausahaan mereka, dan hasil penelitian ini akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode explanatory survey. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, di wilayah-wilayah dimana warganya relatif banyak yang menjadi TKI. Sampel dalam penelitian ini adalah mantan TKI yang jumlahnya ditentukan secara purposive sampling sebanyak 30 orang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, sedangkan data sekunder dibutuhkan untuk mendukung analisa deskriptif.

Hasil penelitian terhadap responden diperoleh hasil diantaranya bahwa sebagian besar TKI berpendidikan rendah, yaitu 13,33% lulusan SD, 46,67% berpendidikan SMP/ sederajat, dan sisanya SMA/ sederajat sebanyak 40%. Pemberdayaan mantan TKI diarahkan pada pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dengan menggali potensi yang ada di daerah asal TKI seperti pertanian, perkebunan, beternak, usaha kelontong maupun usaha lain.

---

*Kata kunci: Buruh Migran (TKI) dan Kewirausahaan*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), total buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah 354.548 orang dan jumlah buruh migran perempuan adalah 280.183 (hampir 80% dari total). Keterbatasan akses ekonomi bagi warga miskin Indonesia menjadi hal utama yang mendorong mereka mengadu nasib di negara lain. Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2006, 17,5% dari 222.192.000 penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin. Pada tahun itu, jumlah pengangguran terbuka hingga Februari 2006 mencapai 11.104.693 orang (10,45%), 5.296.462 orang adalah perempuan (Romidiati, 2003).

Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri terus meningkat dalam dua dasawarsa terakhir. Dan Malaysia merupakan negara tujuan pengiriman TKI terbesar, disamping Hongkong, Taiwan, Korea, dan Arab Saudi. Data dari Depnaker RI menunjukkan bahwa selama PELITA IV (1984-1989) jumlah TKI yang dikirim ke Malaysia tercatat 156.312 orang, meningkat menjadi 428.670 orang pada PELITA VI (Mei 1998).

Saat ini di Malaysia terdapat sekitar 1,2 juta TKI yang bekerja pada berbagai sektor, seperti pekerja ladang, pekerja bangunan, pekerja pabrik, pekerja restoran, dan pembantu rumah tangga. Diperkirakan terdapat sekitar 800.000 TKI ilegal yang jumlahnya semakin hari semakin banyak (Romidiati, 2003).

Warga Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kini bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tercatat sebanyak 18.824 orang. Sebagian besar bekerja di Malaysia, jumlahnya mencapai 15.033 orang. Di Arab Saudi tercatat 3.734 orang. Di Brunei Darussalam 175 orang. Diperkirakan jumlah TKI ilegal dua kali lipat (*Lombok Timur.go.id.*).

## Permasalahan

Menurut hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat (2008) bahwa pada umumnya mayoritas para TKI (84%) merasa menjadi TKI bisa membuat kondisi ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik dan bisa menyisihkan dana untuk modal usaha, membeli lahan, membangun rumah, dan sebagainya. Namun sebagian besar remitansi TKI yang dikirim ke Lombok ternyata digunakan untuk membayar hutang yang mereka gunakan untuk membiayai keberangkatan mereka sebagai TKI.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa walaupun tingkat pendidikan mereka pada umumnya rendah, sebagian besar responden (59,58%) menyatakan tidak memerlukan pelatihan sekembalinya mereka dari luar negeri sebagai TKI tanpa memberikan alasan yang kuat. Disisi lain, dari responden yang menyatakan memerlukan pelatihan, sebagian besar (71%) menyatakan pelatihan yang mereka perlukan adalah dibidang kewirausahaan (BI NTB, 2008).

Untuk itu, peran pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas buruh migran/TKI yang akan diberangkatkan, disamping kerja sama positif dari para TKI sendiri untuk meng-*upgrade* diri demi kehidupan mereka agar menjadi lebih baik. Dan menjadikan TKI mampu mengelola hasil kerja mereka melalui ilmu kewirausahaan yang mereka dapatkan.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan buruh migran purna, menghasilkan model kewirausahaan pada pemberdayaan buruh migran di Kabupaten Lombok Barat.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan buruh migran/TKI melalui program-program kewirausahaan yang mampu menumbuhkan sikap mental *entrepreneurship*, sehingga nantinya para buruh migran/TKI purna tersebut mampu menciptakan peluang usaha dan bisa mandiri. Dan pada gilirannya, mereka tidak perlu lagi kembali atau menjadi buruh migran untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kondisi TKI Terkini

Puluhan tenaga kerja Indonesia saat ini terancam hukuman mati atau dipenjara di Malaysia dan berbagai TKI di sejumlah negara. Dalam waktu dekat, sekitar 40 ribu TKI yang bekerja di Arab Saudi dan sekitar 800 ribu TKI yang bekerja di Malaysia juga dihadapkan pada ancaman deportasi karena tak memiliki dokumen resmi atau melampaui izin tinggal atau *overstay*. Fakta begitu besarnya angka TKI ilegal tanpa perlindungan dokumen legal yang memadai di luar negeri menunjukkan selama ini kita cenderung menggampangkan masalah dan tidak serius melakukan pembenahan. Pengakuan akan sumbangan besar TKI bagi perekonomian tak mampu mengubah nasib sebagian besar TKI; terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, umumnya belum beranjak dari gambaran suram potret perbudakan moderen.

Advokasi pemerintah terhadap TKI, terutama mereka yang menghadapi masalah di luar negeri bisa dikatakan sangat minim. Ini antara lain karena belum adanya perwakilan tetap di semua negara tujuan TKI dan tidak adanya anggaran khusus untuk pelayanan dan perlindungan TKI. BNP2TKI sebagai lembaga yang berada langsung dibawah presiden, dengan wewenang dan tanggung jawab begitu besar belum menunjukkan efektivitas dan giginya. Salah satu contoh adalah lemahnya respon, antisipasi, dan advokasi dalam kasus razia terhadap sekitar 40 ribu TKI ilegal di Arab Saudi baru-baru ini. Juga tidak jelas peran penempatan staf Depnakertrans di setiap KBRI di negara tujuan TKI.

Persoalan TKI di luar negeri, seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, sebenarnya hanya limbah dari persoalan dan penanganan yang kurang baik di dalam negeri. Perlindungan TKI, sebagai negara surplus tenaga kerja dan salah satu pengekspor pekerja migran terbesar di dunia, menurut ekonom Graeme Hugo dari University of Adelaide dan Bank Dunia, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina dan negara eksportir pekerja migran lain dalam mengembangkan kebijakan dan program yang efektif bagi perlindungan TKI. (Dikutip dari: <http://www.kompas.com>)

## Kewirausahaan

Kewirausahaan terdiri atas kata wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial, sehingga kewirausahaan dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Harvey Leibenstein (1979), mengemukakan, kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Penrose (1963): Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Frank Knight (1921): Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan.

Dari beberapa dampak positif kewirausahaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan serta bangsa dan negara. (Sumber: <http://edukasi.kompasiana.com>).

## Pemberdayaan Buruh Migran

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan asing lagi, tetapi PRT yang berubah menjadi seorang pengusaha adalah terobosan baru. Melalui program kewirausahaan ini, para TKI dilatih agar berani bergaul dengan teman-teman baru. Berani interaksi dan berani untuk belajar. Langkah awal yang dipraktikkan adalah mencari pelanggan, bukan mencari keuntungan. Melalui langkah yang baik itu, diharapkan modal yang diperoleh selama menjadi TKI dapat dipergunakan untuk mengembangkan bakat memperluas jaringan bisnis.

Program wirausaha tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan teori saja tanpa praktik. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan PRT Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan juga membuka pekerjaan untuk orang yang kurang beruntung. Penanaman kesadaran diri pada PRT harus semakin tinggi agar tidak lagi bergantung dari pendapatan bekerja di luar negeri sebagai PRT. (Sumber: < <http://buruhmigran.or.id/2012->>)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran pembinaan kewirausahaan pada buruh migran. Konsekwensinya, penelitian ini lebih banyak menjelaskan atau ekplanasi, menganalisis data dan akhirnya memunculkan sejumlah rekomendasi praktis yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mencari solusi terbaik.

Populasi dalam penelitian ini adalah mantan TKI (buruh migran) yang berasal dari Lombok Barat yang diambil sampel secara *purposive sampling* sebanyak 30 orang. Hal ini karena terbatasnya waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan menyebar luas.

Pengumpulan data primer (data langsung dari responden) menggunakan teknik survei dengan melalui observasi dan wawancara menggunakan daftar pertanyaan, dan data sekunder dari buku referensi, jurnal, koran, dsb.

Setelah data terkumpul kemudian analisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada teori atau konsep dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh mengenai permasalahan yang dihadapi, baik oleh buruh migran/TKI maupun pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan program pemberdayaan melalui pola kewirausahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Berdasarkan penelitian diketahui kebanyakan TKI di Kabupaten Lombok Barat berusia antara 16 – 21 tahun ((30%) dan 28 – 33 tahun (27%). Sementara usia tertua TKI adalah antara 40 – 45 tahun (7%). Ini berarti seluruh responden tergolong dalam usia produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Pajaman Simanjuntak (1991) bahwa umur 15 – 64 tahun termasuk usia produktif yang mampu menghasilkan barang (produk) maupun jasa tentunya produk dan barang jasa yang dihasilkan adalah yang tanpa merusak harkat dan moral kewanitaan.

Sebagian besar responden berpendidikan rendah, diantaranya SD sebanyak 4 orang (13,33%), sebanyak 14 orang responden (46,67%) berpendidikan SMP/ sederajat, dan sisanya SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (40%).

### Sikap Mental *entrepreneurship* TKI

Sikap responden terhadap keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri, yaitu sebagian besar yakni 46,67% menyatakan setuju untuk berdiri sendiri setelah dibina oleh BNP2TKI. Sikap responden terhadap pengambilan resiko, yaitu sebagian besar responden (66,67%) menyatakan ragu-ragu mengambil resiko untuk berwirausaha. Sikap responden untuk belajar dari pengalaman, (63,33%) menyatakan bahwa mereka setuju untuk berwirausaha sehingga apa yang didapatkan dari pembinaan akan dipraktikkan, dan mereka berharap untuk tidak kembali menjadi TKI di luar negeri.

Sikap terhadap motivasi terhadap diri sendiri, yaitu 83,33% menyatakan setuju memotivasi dirinya untuk berwirausaha. Sikap untuk bersaing, yaitu 80,00% responden menyatakan setuju untuk bersaing untuk menjadi wirausaha. Sementara sikap orientasi untuk bekerja keras adalah 56,67%. Sikap percaya pada diri sendiri, yakni 70% responden setuju adanya kepercayaan pada diri sendiri. Sikap dorongan untuk berprestasi, yaitu 73,33% responden menyatakan setuju adanya dorongan untuk berprestasi. Sebagian besar responden mempunyai keyakinan kuat akan kemampuan pada diri sendiri (90%). Sikap tidak suka pada uluran tangan dari pihak lain termasuk dari pemerintah, yakni 60% responden menyukai adanya uluran dari pemerintah. Sikap tidak pernah menyerah dan tidak bergantung pada alam, 66,67% responden tergantung pada alam atau situasi dan kondisi yang ada. Artinya seorang TKI akan segera kembali menjadi TKI di luar negeri jika gagal dalam berwirausaha.

### Program Pemberdayaan TKI purna di Lombok Barat

BNP2TKI telah melakukan empat program pemberdayaan TKI purna sepanjang 2011. TKI purna ini menjadi sorotan dan sasaran pemberdayaan BNP2TKI karena kondisi mereka setelah pulang ke daerah asalnya masih cenderung berpikir konsumtif dalam pemanfaatan hasil yang diperolehnya selama bekerja di luar negeri sehingga berulang bekerja kembali ke luar negeri.

Empat program itu adalah, pertama, pembinaan pengembangan usaha yang telah ditekuni TKI purna dengan upaya menggabungkan para wirausaha yang diarahkan pada penguatan asosiasi TKI purna. Kedua, kegiatan temu wicara dan ekspo TKI purna di Kabupaten Lombok Barat. Ketiga, kegiatan bimbingan dalam rangka rehabilitasi TKI purna bermasalah, yang dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dalam rangka rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan psikososial terhadap TKI purna bermasalah, baik yang dibawa dari luar negeri maupun yang dialami setelah berada di daerah asal. Keempat, edukasi perbankan dalam rangka pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif dan bimbingan teknis.

Pemberdayaan mantan TKI diarahkan pada pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dengan menggali potensi yang ada di daerah asal TKI seperti pertanian, perkebunan, beternak, usaha kelontong maupun usaha lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Banyaknya TKI purna yang tidak mampu memanfaatkan hasil kerja di luar negeri berupa gaji/upah dan pengalaman teknis maupun jiwa berani menerima resiko, disebabkan kurangnya pembinaan teknis baik sebelum maupun setelah menyelesaikan kontrak kerja.
2. Pemanfaatan remitansi memiliki dampak yang sangat signifikan, baik bagi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya maupun bagi masyarakat melalui upaya-upaya perluasan kesempatan kerja. Karena itu, pembekalan pengetahuan tentang kewirausahaan menjadi penting bagi TKI dan keluarganya agar remitansi dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif.
3. Melalui studi ini diketahui bahwa kebanyakan TKI purna memiliki potensi cukup tinggi untuk dapat diberdayakan melalui bimbingan teknis kewirausahaan yang dirancang sesuai dengan potensi berdasarkan hasil identifikasi.
4. Pemerintah daerah melalui program dan kegiatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan kewirausahaan.

### Saran-saran

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas TKI melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, peran pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas TKI yang akan diberangkatkan, disamping kerja sama positif dari para TKI sendiri untuk meng-upgrade diri demi kehidupan mereka agar menjadi lebih baik.
2. Penguatan kelembagaan di desa asal, kecamatan dan kabupaten, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan partisipasi masyarakat.
3. Pendampingan mantan TKI dan keluarganya dalam mengelola remitansi dan menyelesaikan persoalan keluarga.
4. Bimbingan teknis dikembangkan memanfaatkan potensi daerah tinggal mantan TKI yang akuntabel, berkelanjutan, dilakukan monitoring dan evaluasi dalam sistem umpan balik.
5. Penyusunan *data base* TKI yang terintegrasi (sampai ke desa asal) dan pengalokasian dana bagi pengelolaan TKI secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_.2012. *Kelas Wirausaha Bagi TKI Singapura Makin Diminati*.  
< <http://buruhmigran.or.id/2012>> (diakses 17 Oktober 2013).
- \_\_\_\_\_.2011. *PTK Mahnetik Cianjur Luncurkan Rumah Pintar untuk TKI*.  
< <http://buruhmigran.or.id/2011>> (diakses 17 Oktober 2013).
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengertian, Tujuan, dan Teori Kewirausahaan: Materi Kuliah*.  
<<http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/06/-444369.html>>
- Bank Indonesia NTB, 2008. *Laporan Hasil Survey Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat*.
- BNP2TKI, 2007. Disampaikan dalam Paparan Publik Capaian 100 Hari Kerja BNP2TKI, & Agustus 2007.
- Jonson, G.L., 1986. *Research Methodology For Economist, Philosophy and Practics*. McMillan Publishing, London.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bahan Kuliah SP 605 Program Pascasarjana ITB 1 Desember 2003.
- Riza, Risyanti, dan H. Roesmidi, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR).
- Romidiati, Haning. 2003. *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Rekrutmen dan Pengelolaannya, Penduduk dan Pembangunan*, Jilid XII No.2, Jakarta.
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1999. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES Jakarta.